

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka birokrasi pemerintahan, kepala pemerintahan perlu memiliki kemampuan dalam menganalisis kebutuhan masyarakat. Pendekatan seorang pemimpin yang melibatkan diri secara langsung dalam menghadapi situasi sulit di lapangan akan berdampak positif terhadap kepekaan pemerintah tersebut dalam mengatasi permasalahan yang timbul. Penulis berharap bahwa penelitian mengenai collaborative governance terkait pengembangan dan pemeliharaan budidaya kepiting bakau di Kabupaten Natuna, beserta dengan semua konflik dan peran yang dimainkan oleh berbagai pihak yang terlibat, akan memberikan manfaat yang besar bagi penulis, para pemangku kepentingan pemerintahan, dan masyarakat Kabupaten Natuna.

Wilayah Indonesia memiliki potensi sumber daya hewani dan tumbuhan yang belum dimanfaatkan secara optimal saat ini. Sebagai negara dengan banyak pulau, Indonesia perlu memaksimalkan penggunaan perairan sebagai jalur penghubung antar pulau. Potensi ini dapat mendukung kemajuan sosial ekonomi masyarakat Indonesia agar menjadi lebih makmur dan adil. Kabupaten Natuna, yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, memiliki kondisi geografis yang sangat cocok untuk pertanian, perkebunan, dan peternakan. Hal ini disebabkan oleh luasnya

lahan yang masih tersedia dan subur, serta keberadaan bukit yang baik dan sumber air yang mencukupi untuk pengairan lahan pertanian. Kabupaten Natuna terletak pada posisi 3° Lintang Utara (LU) sampai 4° 46' (LU) dan 107° 45' Bujur Timur (BT) hingga 108° 23' BT. Kondisi iklim di kepulauan Natuna berubah tergantung dengan kondisi perubahan angin. Bulan maret hingga juni biasanya terjadi musim kemarau. Curah hujan rata-rata setahun berkisar 286,2 milimeter dengan temperatur berkisar antara 20,4°C hingga 35,2°C pada tahun 2019 seperti yang dikutip dari laporan Kabupaten Natuna dalam Angka. Sementara untuk musim hujan, masyarakat memiliki perumpamaan yang sering biasa disebut sebagai musim angin utara. Musim angin utara adalah bagian dari musim hujan yang disertai angin kencang, sehingga masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan tidak bisa melaut dan akan bergantung pada sumber daya alam di darat.

Keadaan geografis dan kualitas sumber daya alam yang ada di suatu wilayah dapat memengaruhi jenis pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk setempat. Contohnya, di daerah pesisir, masyarakat cenderung mengandalkan sumber daya laut sebagai mata pencaharian utama. Kabupaten Natuna, misalnya, memiliki pantai yang luas dan keberagaman sumber daya laut yang masih dalam kondisi baik. Selain itu, hutan mangrove di daerah ini juga memiliki potensi sebagai sumber daya kelautan yang bernilai tinggi.

Natuna dikelilingi laut dalam dan di ujung utara berbatasan langsung dengan perairan Vietnam, Kamboja, Malaysia dan Singapura. Dengan posisi

di kelilingi laut luas Natuna menjadi terpencil, serta minim fasilitas sosial dan fasilitas umum. Sebenarnya Kepulauan Natuna ini mempunyai peran sektor unggulan yaitu kelautan dan perikanan serta wisata bahari karena:

1. Sektor Kelautan memiliki potensi yang sangat besar, terutama didalamnya terdapat cadangan kandungan minyak dan gas bumi yang masih berpeluang untuk dieksploitasi produksinya. Hal ini memberikan sumbangan yang besar terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Sektor Perikanan memiliki potensi yang sangat besar, terutama untuk pengembangan Perikanan Tangkap dan Budidaya Perikanan, karena luas laut yang dimiliki sebesar 46.031,81 Km² (98,65%) dan garis pantai sepanjang 1.128,57 Km² , hal ini telah memberikan peranan yang sangat penting terhadap perekonomian masyarakat. Disamping itu keunggulan sektor ini akan dapat pulih kembali.

Kepiting bakau, yang dikenal sebagai ketam mangok oleh masyarakat setempat, adalah salah satu jenis kepiting yang hidup di ekosistem hutan bakau dan estuaria. Kepiting ini termasuk dalam suku *Portunidae* dan memiliki harga jual yang tinggi serta citarasa yang lezat, sehingga menjadi incaran konsumen. Tidak hanya sebagai makanan, di berbagai wilayah, kepiting bakau bahkan telah menjadi sumber pendapatan ekonomi dan tujuan ekspor yang penting.

Kabupaten Natuna terletak di wilayah pesisir dengan lingkungan yang kaya akan sumber daya alam, termasuk hutan bakau yang subur.

Kepiting bakau, sebagai salah satu jenis komoditas ekspor, dapat ditemukan dalam jumlah besar di wilayah ini. Kaya akan sumber daya alam ini memberikan potensi besar untuk pengembangan ekonomi melalui ekspor kepiting bakau. ekosistem yang unik. Ekosistem mangrove yang ada di sini sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan laut dan ekosistem pesisir. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengelolaan kepiting bakau harus memperhatikan dampaknya terhadap ekosistem dan upaya pelestariannya.

Upaya peningkatan ekonomi masyarakat adalah tujuan penting dalam penelitian ini. Kabupaten Natuna adalah salah satu daerah yang masyarakatnya masih sangat bergantung pada sektor pertanian dan perikanan. Pengembangan potensi ekspor kepiting bakau dapat memberikan lapangan kerja baru dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat setempat. Dalam rangka menjadikan Kabupaten Natuna sebagai tempat penelitian, penting untuk memperoleh izin dan kerjasama dari pihak berwenang serta melibatkan masyarakat setempat dalam proses penelitian. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dapat mendorong pengelolaan yang berkelanjutan dan upaya peningkatan ekonomi di wilayah ini.

Kepiting bakau menjadi fokus penting dalam upaya meningkatkan ekonomi di daerah pesisir seperti Kabupaten Natuna melalui ekspor. Meskipun populasi kepiting bakau tidak sebanyak kepiting rajungan atau

spesies lainnya, budidaya dan pengembangbiakan dapat menjadi solusi untuk memperbaiki ekosistem mereka. Pembudidayaan tambak kepiting bakau merupakan langkah yang tepat untuk menjaga jumlah populasi mereka. Konsumsi harian oleh masyarakat dapat berdampak negatif pada populasi kepiting bakau, oleh karena itu diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk menemukan solusi yang berkelanjutan.

1. 1 Data Lalu Lintas Kepiting Bakau Di WILKER KIPM Natuna Tahun 2021-2023

NO	TAHUN	VOLUME (EKOR)	NILAI (Rp)	TUJUAN
1.	2021	80.333	1.004.162.500	Batam
2.	2022	69.286	866.075.000	Batam
3.	2023	49.855	623.187.500	Batam

Sumber: BKIPM Natuna

Data lalu lintas kepiting bakau di Wilker KIPM Natuna selama tahun 2021-2023 mencerminkan adanya tren penurunan signifikan baik dalam volume ekspor maupun nilai ekspor. Pada tahun 2021, volume ekspor mencapai 80.333 ekor dengan nilai sebesar 1.004.162.500 Rp, namun mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 69.286 ekor dengan nilai 866.075.000 Rp, dan terus menurun pada tahun 2023 dengan volume sebanyak 49.855 ekor dan nilai 623.187.500 Rp. Adanya penurunan ini secara khusus terjadi dalam ekspor ke Batam, yang merupakan tujuan utama ekspor kepiting bakau dari Wilker KIPM Natuna selama periode tersebut. Faktor-faktor yang mungkin berkontribusi terhadap penurunan ini dapat melibatkan perubahan dalam permintaan pasar, kebijakan ekspor yang

berubah, atau bahkan dampak lingkungan yang memengaruhi populasi kepiting bakau. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut untuk memahami penyebab penurunan tersebut dan merumuskan strategi yang tepat guna meningkatkan kembali volume dan nilai ekspor kepiting bakau ke Batam serta menjaga keberlanjutan bisnis di sektor ini. Evaluasi yang cermat terhadap faktor-faktor penyebab penurunan dan penerapan langkah-langkah perbaikan akan menjadi kunci untuk memajukan industri ekspor kepiting bakau di Wilker KIPM Natuna.

Mengalakkan ekspor dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, terutama jika ekspor tersebut dilakukan oleh masyarakat sendiri sebagai salah satu sumber pendapatan yang menguntungkan, dengan tetap memperhatikan pelestarian populasi kepiting bakau. Apabila pemerintah turut berperan dalam hal ini, ekspor tidak hanya akan menjadi sumber pendapatan yang menguntungkan bagi masyarakat, tetapi juga akan menjadi upaya untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Natuna. Potensi besar dimiliki oleh masyarakat dalam mencapai kemajuan desa. Apabila sumber daya manusia dan alam digunakan secara efektif, ini akan menjamin terbentuknya desa yang sejahtera dan terhindar dari kemiskinan.

Sebagai contoh pada tahun 2022, pemerintah Kabupaten Natuna melaporkan beberapa hasil kinerja atau capaian disektor perikanan seperti:

1. Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2022: 134,874.55 Ton

Data ini mencerminkan jumlah total hasil tangkapan dari perikanan tangkap yang terjadi di Kabupaten Natuna selama tahun 2022.

2. Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2022: 4,264.11 Ton

Data ini mencerminkan jumlah total produksi dari perikanan budidaya yang dilakukan di Kabupaten Natuna selama tahun 2022.

3. Produksi Olahan Hasil Perikanan Tahun 2022: 526.1 Ton

Data ini mencerminkan jumlah total produksi olahan hasil perikanan yang dihasilkan di Kabupaten Natuna selama tahun 2022.

Pengembangan dan pengelolaan kepiting bakau merupakan metode yang tepat untuk memungkinkan pemerintah memiliki berbagai pilihan kegiatan yang berdampak positif pada perekonomian masyarakat di Kabupaten Natuna. Ide ini bersumber dari pengamatan penulis tentang potensi kepiting bakau yang seharusnya dapat dimanfaatkan, sehingga tidaklah tidak mungkin ekspor baik ke dalam negeri maupun luar negeri dapat terwujud. Potensi sumber daya kelautan Kabupaten Natuna memiliki potensi yang menjanjikan.

1. 2 Data Ekspor potensi Perikanan 2021

Tahun	Lokasi Ekspor	Jumlah Ekspor (Ton)	Frekuensi Ekspor (per bulan)	Komoditas Utama	Berat Rat-a-Rata (kg)	Ukuran Lobster Minimal	Jenis Kapal	Waktu Perjalan (hari)
-------	---------------	---------------------	------------------------------	-----------------	-----------------------	------------------------	-------------	-----------------------

2021	Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Natuna	156.185	1-2 kali	Kerapu Cantang, Kerapu Cantik, Kerapu Macan, Kerapu Gepeng, Lobster	1,2	8 ons	Kapal berukuran 390 GT dengan sistem sirkulasi dan metode packing terbuka	6-7
------	---	---------	-------------	---	-----	-------	--	-----

Sumber: DISKAN Kabupaten Natuna

Berdasarkan hasil data ekspor potensi perikanan pada tahun 2021 di Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Natuna, dapat disimpulkan bahwa lokasi tersebut memiliki potensi besar dalam kegiatan ekspor perikanan. Volume ekspor mencapai 156.185 ton dengan frekuensi ekspor sebanyak 1-2 kali per bulan. Komoditas utama yang diekspor melibatkan jenis ikan seperti Kerapu Cantang, Kerapu Cantik, Kerapu Macan, Kerapu Gepeng, dan Lobster. Berat rata-rata per ekspor adalah sekitar 1,2 kg dengan ukuran lobster minimal sebesar 8 ons. Proses ekspor dilakukan dengan menggunakan kapal berukuran 390 GT yang dilengkapi dengan sistem sirkulasi dan metode packing terbuka. Waktu perjalanan yang dibutuhkan untuk ekspor ini sekitar 6-7 hari. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa Sedanau memiliki potensi sebagai pusat ekspor perikanan yang signifikan dengan ragam komoditas dan metode ekspor yang telah diterapkan secara efisien. Diperlukan pemantauan dan analisis lebih lanjut untuk memastikan keberlanjutan dan potensi pengembangan lebih lanjut

dalam kegiatan ekspor perikanan di wilayah ini.. Sebagai contoh daerah yang kaya akan sumber daya kelautannya, Natuna seharusnya bisa diharapkan mendorong sektor lain pada kelautan dan perikanan seperti rumput laut, bulu babi hingga Keipiting Bakau.

. Berdasarkan perhatian terhadap isu tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan studi penelitian dengan judul: "Collaboarative Governance Pada Pengembangan Dan Pengelolaan Potensi Ekspor Kepiting Bakau Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Natuna."

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Siapa saja aktor yang terlibat dalam proses kolaborasi pemerintah pada pengembangan dan pengelolaan potensi ekspor kepiting bakau sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Natuna.
2. Bagaimana bentuk kolaborasi disetiap aktor pada tahapan-tahapan Collaborative Governance sebagai upaya peningkatan ekonomi Masyarakat Kabupaten Natuna.

1.3 Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan masalah yang akan dijadikan inti pembahasan maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Menjelaskan setiap aktor yang terlibat pada proses kolaborasi pemerintah pada upaya peningkatan ekonomi masyarakat Kabupaten Natuna disektor ekspor kepiting bakau.
2. Menjelaskan bentuk kolaborasi tersebut pada proses pengelolaan dan pengembangan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menganalisis strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna untuk memperbaiki ekonomi melalui sektor ekspor sumber daya kelautan, sambil juga berkontribusi pada peningkatan pengetahuan dalam ilmu sosial dan politik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dari segi praktis, harapannya adalah bahwa penelitian ini dapat mengubah pandangan masyarakat dan juga meningkatkan pemahaman tentang pengembangan budidaya kepiting bakau sebagai sektor penting bisnis yang menguntungkan namun tetap menjaga populasinya.

1.5 Tinjauan Pustaka

Sebelum mengulas lebih lanjut mengenai collaborative governance, penting untuk terlebih dahulu menjelaskan konsep governance. Penjelasan

mengenai governance diperlukan karena istilah ini menjadi landasan bagi pemahaman collaborative governance. Hal ini bertujuan agar kita dapat memiliki pemahaman yang lebih konkret dan menghindari kebingungan bagi peneliti dan pembaca. Dalam konteks studi Ilmu Pemerintahan, seringkali kita menghadapi istilah government dan governance, meskipun kedua istilah tersebut mirip, sebenarnya memiliki makna yang berbeda.

Menurut penelitian oleh (Fajri et al., 2021), mereka berpendapat bahwa Salah satu pendekatan dalam pengelolaan yang saat ini dapat digunakan adalah pendekatan kolaboratif. Kolaborasi dianggap efektif dalam mengumpulkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu lembaga untuk bersama-sama menyelesaikan masalah, termasuk masalah yang terkait dengan pemberdayaan sosial. Selama ini, pengelolaan pemberdayaan sosial, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, cenderung terpusat pada pemerintah dan kurang melibatkan pemangku kepentingan lain di luar pemerintah, seperti masyarakat dan sektor usaha. (Riansyah et al., 2023) juga menambahkan bahwa keterlibatan berbagai pihak dalam pendekatan tata kelola kolaboratif bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar dapat mengembangkan potensi yang ada di wilayah mereka. Kolaborasi ini mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan sumber daya alam, aktivitas ekonomi, serta kontribusi positif dari berbagai sektor terkait. Keberlanjutan usaha di setiap daerah harus dijaga dan diperhatikan agar setiap tahunnya dapat mengalami perkembangan yang signifikan, sehingga masyarakat dan pemerintah tidak hanya berfokus pada

pengelolaan sumber daya alam yang sudah ada, tetapi juga membuka peluang untuk menemukan potensi baru yang dapat dimanfaatkan.

Dalam usaha meningkatkan ekonomi masyarakat, masalah yang dihadapi begitu kompleks sehingga seringkali membuat masyarakat enggan bekerja sama baik dengan pemerintah maupun pihak swasta. Menurut (Bila Aziza, 2019), mereka menyatakan bahwa Collaborative governance berkaitan dengan kebijakan dan isu-isu publik. Sementara konsep governance lainnya berfokus pada isu-isu dan cara penyelesaiannya, Collaborative governance mendorong stakeholder dan lembaga-lembaga terkait untuk bekerja sama dalam bentuk interaksi dan kompromi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerjasama antara pemerintah daerah dan non-pemerintah dalam kolaborasi ini telah membawa dampak positif secara umum. Namun, penting untuk mengingatkan tentang pentingnya pemahaman bersama dan kesepakatan dalam mengatasi tantangan yang kompleks dalam pembangunan multi-aktor, yang bisa menjadi hambatan dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana diungkapkan oleh (Tamrin & Raharja, 2021).

Upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi setiap aspek pembangunan di berbagai daerah termasuk pemberdayaan masyarakat telah menjadi salah satu strategi. (Endah, 2020) mengemukakan bahwa potensi lokal merujuk pada kemampuan, kekuatan, dan sumber daya yang ada di tingkat desa yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, sumber daya manusia dan sumber daya alam dianggap sebagai faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan desa. Endah juga menekankan bahwa

sumber daya manusia sebagai subyek pembangunan memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di desa, sedangkan sumber daya alam merupakan kekayaan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi di desa tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menggali potensi lokal yang ada di desa guna menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera bagi penduduk setempat. Potensi lokal, yang mencakup daya, kekuatan, kemampuan, dan sumber daya di tingkat desa, memiliki peran sentral dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Endah, 2020).

Beberapa contoh upaya pemberdayaan masyarakat di berbagai daerah lainnya sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia lokal dapat ditemukan di Kabupaten Karimun. Pada (Fitryanti Kamila, Kustiawan, 2022), penelitian mereka menunjukkan bahwa Desa Keban telah menggunakan pendekatan yang inklusif dengan menyediakan fasilitas, sarana, dan prasarana, serta membawa tenaga ahli dan narasumber, serta memberikan pendampingan manajemen keuangan. Selain itu, mereka juga menjalankan program-program berkelanjutan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang mandiri. Sebagai entitas pemerintah tingkat desa, Desa memiliki peran dan kewenangan penting dalam meningkatkan tingkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta memanfaatkan potensi alam yang dimiliki oleh desa tersebut. Oleh karena itu, terdapat beberapa faktor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan, seperti sektor pariwisata,

pemberdayaan petani, pemberdayaan nelayan, dan penggunaan sumber daya alam yang ada.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Nopi et al., 2021), potensi lokal di suatu desa mencakup berbagai sumber daya, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia, yang dapat dikembangkan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan. Proses optimalisasi potensi lokal melibatkan beberapa tahap, seperti memberikan sosialisasi kepada masyarakat (tahap penyadaran), memberikan pelatihan kepada masyarakat (tahap pengkapasitasan), dan mendorong masyarakat yang sudah memiliki kemampuan untuk memproduksi makanan lokal, yang dalam konteks ini disebut sebagai tahap pendayaan (Nopi et al., 2021).

Salah satu potensi lokal yang ada di daerah kabupaten Natuna adalah sektor kelautan dan perikanan. Sebagai daerah maritim dengan segala jenis biodata lautnya, masyarakat dan pemerintah sudah seharusnya memanfaatkan segala macam potensi tersebut. Negara kita memiliki potensi budidaya perikanan pantai yang sangat luas, yang didukung oleh fakta bahwa Indonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki garis pantai yang melebihi 81.000 kilometer, tersebar di antara 6° LU-11° LS dan 95° BT-141° BT, dengan 70 persen wilayahnya terdiri dari laut (perairan), membentang dari Sabang hingga Merauke. Daerah yang memiliki sumber daya alam yang baik sangat membantu kegiatan perekonomian serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Komoditas yang terbilang cukup diminati oleh masyarakat serta konsumen luar daerah bisa jadi adalah sumber pendapatan masyarakat maupun pemerintahan daerah. Kepiting bakau (*Scylla*

serrata) merupakan salah satu komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar global. Kepiting ini sangat diminati baik oleh konsumen lokal maupun internasional, dan dalam dekade terakhir, terdapat peningkatan rata-rata sebesar 14,06% dalam ekspor kepiting. Selain itu, komoditas ini juga kaya akan nilai gizi, dengan tingkat protein dan lemak yang tinggi. Bahkan, telur kepiting memiliki kandungan protein mencapai 88,55%. (Fardiyah et al., 2021).

Dengan potensi yang sangat besar dari kepiting bakau di Kabupaten Natuna sebagai sumber daya yang menjanjikan, tidaklah mengherankan jika pemerintah akan mempertimbangkan opsi untuk mengembangkannya sebagai salah satu sektor ekspor baik dalam maupun luar negeri di masa depan" (Ali Mursit et al., 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Mursit, Agus, dan Yuli pada tahun 2022 telah mengidentifikasi bahwa komoditas ekspor industri perikanan Indonesia dengan kode HS 0303 memiliki keunggulan komparatif. Data statistik perikanan dari tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan volume ekspor tertinggi dan nilai ekspor terbesar. Hasil analisis SWOT menghasilkan beberapa implikasi strategi, termasuk optimalisasi penggunaan sumber daya laut, peningkatan kerjasama internasional, pengelolaan perikanan berbasis WPP, peningkatan kualitas hasil tangkapan nelayan, peningkatan peran pemerintah dalam menjaga keamanan pangan, serta pengembangan infrastruktur transportasi dan pendukung lainnya. Selain itu, diperlukan sinergi antara otoritas perpajakan, bea cukai, lembaga pembiayaan sektor perikanan dan kelautan, pengembangan kawasan industri terpadu, peningkatan armada kapal di atas 30 GT yang dimiliki oleh

badan usaha desa/koperasi, dan optimalisasi sumber pembiayaan alternatif untuk inisiatif konservasi.

Upaya pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah bertujuan untuk mencapai partisipasi ekonomi yang lebih tinggi dan memastikan akses yang merata bagi semua lapisan masyarakat dalam proses produksi, distribusi, serta pemanfaatan potensi daerah tanpa ada hambatan. Karenanya, pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengatasi situasi ini melalui kebijakan yang diterapkan untuk meningkatkan perekonomian, baik bagi masyarakat nelayan di wilayah tersebut secara khusus maupun masyarakat pada umumnya di masa depan (Achmad, 2022).

Pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh para peneliti, mayoritas fokusnya adalah tentang manajemen dan perkembangan sumber daya kelautan sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Beberapa penelitian juga mencakup strategi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Namun, perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah bahwa dalam penelitian ini, peneliti mendiskusikan strategi yang seharusnya diimplementasikan oleh pemerintah sebagai salah satu aktor dalam kerangka kerja kolaboratif pemerintahan. Langkah-langkah yang dilibatkan oleh aktor-aktor terkait mencakup analisis situasi lingkungan strategis yang mencermati kondisi kepiting bakau, analisis isu strategis, analisis dampak, dan analisis potensi pengembangan dalam pengelolaan sumber daya kelautan, dengan mempertimbangkan aspek ekspor, baik dalam maupun luar negeri.

Selain itu, perbedaan signifikan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini secara khusus membahas tentang Kolaborasi Pemerintahan dalam Pengembangan dan Pengelolaan Potensi Ekspor Kepiting Bakau sebagai Sarana untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Natuna. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran yang mencolok dari penelitian sebelumnya. Dalam konteks ini, penelitian ini akan menguraikan strategi yang diadopsi oleh Pemerintah Kabupaten Natuna dalam mengelola populasi kepiting bakau yang memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang terlibat dalam upaya pengelolaan dan pengembangan tersebut

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Collaborative Governance

1.6.1.1 Pengertian Collaborative Governance

Dalam beberapa tahun terakhir, collaborative governance (tata kelola pemerintahan bersama) telah menjadi topik yang semakin diminati oleh para akademisi dalam ranah kebijakan publik. Collaborative Governance muncul sebagai tanggapan terhadap permasalahan seperti kesulitan dalam implementasi, biaya yang tinggi, dan politisasi regulasi dalam sektor publik. Pendekatan ini mencakup semua tahap dalam pembuatan kebijakan publik. Collaborative governance adalah paradigma baru yang menggambarkan peran berbagai pihak dalam urusan-urusan

publik. Artikel ini secara rinci menjelaskan dinamika collaborative governance dalam penelitian kebijakan publik yang terkait dengan prinsip-prinsip dasar dari perspektif "new public governance" dalam menghadapi proses pembuatan kebijakan. Dalam konteks ini, hubungan yang kompleks antara para aktor dalam kebijakan publik telah menciptakan konsep baru yang dikenal sebagai collaborative governance.

Kepentingan utama dalam collaborative governance adalah kerjasama, pembagian tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab bersama, di mana para pihak yang terlibat memiliki tujuan yang sama, persepsi yang sejalan, kemauan untuk berkolaborasi, keterbukaan, kerelaan untuk memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang, serta fokus pada kepentingan masyarakat (Gray & Francisco, 1989). Dengan kata lain, collaborative governance merujuk pada proses dan kerangka kerja yang melibatkan berbagai pihak di luar organisasi tersebut dalam pengelolaan dan pembuatan kebijakan publik.. Kolaborasi mengacu pada kerjasama yang resmi, aktif, jelas, dan fokus pada kepentingan bersama dalam pengelolaan dan pembuatan kebijakan publik.. Nilai-nilai dasar yang mendasari collaborative governance meliputi orientasi pada konsensus dalam pengambilan keputusan (tujuan), kepemimpinan kolektif dalam kerangka kelembagaan (struktur), komunikasi yang berjalan ke berbagai arah dalam hubungan antar manusia (interaksi), dan berbagi sumber daya dalam tindakan bersama (proses) (Dewi, 2019). Nilai-nilai dasar ini saling terintegrasi dalam setiap tahapan dalam pembuatan kebijakan

publik."Sebagaimana yang dikatakan oleh (Dewi, 2019), hubungan yang kompleks antara para aktor dalam kebijakan publik telah menghasilkan konsep baru yang dikenal sebagai "governance kolaboratif." Secara singkat, collaborative governance adalah sebuah proses yang melibatkan aktor-aktor sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Kolaborasi ini memiliki manfaat dalam membentuk kerjasama yang resmi, aktif, terbuka, dan berfokus pada kepentingan bersama dalam manajemen dan kebijakan publik. Nilai dasar dari konsep ini mencakup orientasi pada pencapaian Konsensus dalam proses pengambilan keputusan (tujuan), perkembangan kepemimpinan bersama dalam kerangka struktural kelembagaan (struktur), komunikasi yang melibatkan banyak pihak dalam interaksi manusia (interaksi), dan berbagi sumber daya dalam pelaksanaan langkah-langkah (proses). Nilai-nilai dasar ini saling terkait dan berkelanjutan dalam setiap tahap pelaksanaannya.

Dalam konteks konsep New Public Management (NPM), swasta dianggap sebagai sektor yang lebih efisien dalam manajemen dibandingkan dengan pemerintah. Hal ini menjadi dasar mengapa pemerintah tertarik untuk menjalin kerjasama dalam berbagai aspek, terutama dalam penyediaan pelayanan publik. Sebagaimana diungkapkan oleh (Dewi, 2019), konsep collaborative governance melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran yang penting. Mereka dianggap sebagai mitra dan rekan kerja yang berkolaborasi Dalam rangka mencapai tujuan yang sejalan dengan peraturan dan perjanjian bersama yang menguntungkan

dalam produksi barang dan layanan. Dalam jurnal yang relevan, juga dijelaskan bahwa kerja sama adalah karakteristik yang melekat dalam masyarakat Indonesia, dan hal ini sejalan dengan konsep saat ini di pemerintahan yang dikenal sebagai collaborative governance. Secara prinsip, collaborative governance melibatkan berbagai pihak yang terlibat, yang bertindak sebagai Mitra dan kolaborator, dalam rangka mencapai tujuan yang sejalan dengan peraturan dan perjanjian bersama yang menguntungkan dalam penyediaan barang dan layanan.

1.6.1.2 Aktor Yang Terlibat

Kerjasama antara pemerintah dan entitas di luar pemerintah dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bidang kemitraan, termasuk: (1) kerjasama internal antara instansi pemerintah, (2) kerjasama antara instansi pemerintah dan sektor bisnis, dan (3) Kerjasama antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil (Arma & Terbuka, 2023). Collaborative governance adalah sebuah pendekatan di mana pemerintah bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah, untuk mengatasi masalah-masalah yang kompleks dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. Peran pemerintah dalam collaborative governance sangat penting dan dapat mencakup beberapa aspek seperti fasilitator, regulator, pemberi dukungan finansial, penyusun kebijakan dan lain-lain.

Menurut (Dahlia, 2023) dalam *Journal of Governance Innovation*, esensi dari tata kelola Pemerintahan yang efisien bertujuan untuk mencapai tata kelola negara yang kuat, transparan, efektif, dan efisien, sambil mempertahankan kolaborasi yang produktif antara tiga pilar pemerintahan yang berkinerja baik. Pemerintahan yang berkinerja baik tak dapat dipisahkan dari serangkaian peraturan yang menjadi dasar kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mereka. Awalnya, Pengembangan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia telah diperjuangkan sejak rezim Orde Baru jatuh pada tahun 1998, terutama seiring dengan munculnya gerakan reformasi pada masa tersebut. (Dahlia, 2023) juga mengemukakan bahwa paradigma Governance Pada awalnya, konsep ini muncul di beberapa negara maju sebagai reaksi terhadap keterbatasan peran pemerintah, yang kemudian memicu pertumbuhan Collaborative Governance (melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil) yang berperan dalam proses pembangunan.

Salah satu aspek dalam konsep penyelenggaraan pemerintahan, yang juga dikenal sebagai governance, adalah konsep collaborative governance atau penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan kolaborasi. Menurut (Dorisman et al., 2021), "Collaborative governance is the reforea type of governance in which public and private actor work collectively in distinctive way, using particular processes, to establish laws and rules for the provision of public goods." Dalam konteks ini, sektor swasta memiliki peran yang dapat diambil dalam kerangka collaborative

governance dalam berbagai cara. Collaborative governance adalah pendekatan di mana pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, masyarakat sipil, dan organisasi non-pemerintah, untuk mengatasi masalah-masalah yang kompleks dan mencapai tujuan bersama. Swasta dapat berfungsi sebagai sumber pendanaan dan investasi untuk proyek-proyek pemerintah yang memiliki dampak positif terhadap masyarakat atau lingkungan. Contohnya adalah investasi dalam infrastruktur berkelanjutan, energi terbarukan, atau proyek-proyek sosial. Selain itu, sektor swasta juga seringkali menjadi inovator dalam teknologi dan berperan dalam mengembangkan solusi baru untuk masalah-masalah pemerintah, termasuk teknologi berkelanjutan, layanan digital, dan sistem manajemen data.

(Zulhadi et al., 2023) menjelaskan bahwa Collaborative Governance adalah salah satu jenis governance yang menekankan pentingnya kondisi di mana aktor publik dan aktor privat (bisnis) bekerja sama dengan cara dan proses tertentu untuk menciptakan produk hukum, peraturan, dan kebijakan yang sesuai untuk kepentingan masyarakat. Konsep ini mengindikasikan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, aktor publik, seperti pemerintah, dan aktor privat, seperti organisasi bisnis, tidak beroperasi secara terpisah dan mandiri, melainkan bekerjasama untuk kepentingan publik.

Selain itu, masyarakat (atau publik) memiliki peran yang signifikan dalam konsep collaborative governance atau tata kelola

kolaboratif. Collaborative governance adalah pendekatan dalam pengambilan keputusan publik di mana berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah (NGO), dan masyarakat umum, bekerja sama untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan dan program yang memengaruhi kepentingan bersama. Masyarakat memegang peranan penting dalam memberikan masukan dan wawasan terkait isu-isu yang terkait dengan kebijakan publik. Partisipasi mereka dapat terjadi melalui berbagai saluran seperti pertemuan umum, konsultasi publik, kelompok kerja, atau forum online, untuk memberikan kontribusi dan sudut pandang mereka.

Masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program yang telah disetujui, memastikan bahwa program-program tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan awalnya. Menurut (Yulistiana, 2023), pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, yang disebut sebagai Partisipatory Development, adalah proses di mana mereka secara aktif terlibat dalam semua keputusan penting yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Salah satu dampak positif dari partisipasi adalah bahwa program-program yang dijalankan akan lebih responsif terhadap kebutuhan dasar yang sebenarnya. Partisipasi masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan suatu program, karena masyarakat menjadi subjek yang aktif dalam pembangunan pariwisata. Dengan melibatkan masyarakat sebagai pihak penting dalam collaborative

governance, diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan berkelanjutan yang mencerminkan kepentingan bersama.

Salah satu aspek dari pembangunan berkelanjutan adalah pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan untuk mengaktifkan potensi, keterampilan, dan sumber daya manusia di suatu daerah. Adisasmita (Rahayu, 2019) menganggap pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk mengelola dan memanfaatkan berbagai sumber daya, termasuk sumber daya manusia, perencanaan, anggaran, peralatan, teknologi, dan elemen-elemen lain yang diperlukan dalam pembangunan. Hal ini mencakup proses pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, serta hasil yang dicapai, termasuk pencapaian tujuan, efektivitas, dan efisiensi dari rencana pembangunan yang diterapkan.

1.6.1.3 Tahapan-Tahapan

Menurut (Dorisman et al., 2021), kolaborasi governance adalah pendekatan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai solusi yang lebih holistik, berkelanjutan, dan partisipatif dalam mengatasi masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam konteks ini, kolaborasi merupakan proses perubahan dalam pengambilan keputusan kebijakan, yang melibatkan sektor non-pemerintah secara langsung dalam pembahasan isu-isu krusial yang

menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan tersebut. Kolaborasi ini juga menciptakan ketergantungan saling antara pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, dalam upaya mengelola sumberdaya yang sulit dicapai jika dilakukan secara individu.

Dalam proses kolaboratif pemerintahan, (Ratner, 2012) mengidentifikasi tiga tahap utama. Tahap pertama disebut Identifying Obstacles and Opportunities (Fase Mendengarkan), di mana pemerintah serta para pemangku kepentingan, seperti sektor swasta dan masyarakat, bekerja sama untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin timbul selama proses tata kelola pemerintahan. Pada tahap ini, pihak-pihak terlibat berdiskusi dan mendengarkan dengan cermat tentang masalah yang dihadapi. Mereka juga mencari Mencari peluang dalam menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasi dan menemukan solusi yang efisien.

Tahap kedua adalah Debating Strategies For Influence (Fase Dialog), di mana para pemangku kepentingan yang terlibat berdiskusi tentang langkah-langkah yang paling efektif untuk mengatasi masalah tersebut dan membahas bagaimana mendapatkan dukungan dari pihak-pihak yang relevan dalam proses tata kelola pemerintahan yang sedang dijelaskan.

Tahap ketiga adalah Planning Collaborative Actions (Fase Pilihan), di mana setelah melewati tahap pertama dan kedua, para pemangku

kepentingan yang terlibat mulai merencanakan implementasi dari strategi-strategi yang telah didiskusikan sebelumnya. Mereka mengidentifikasi langkah-langkah awal yang akan diambil dalam proses kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Selain itu, mereka juga menetapkan metrik untuk mengukur perkembangan setiap langkah yang diambil dan merencanakan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan kolaborasi dalam jangka panjang.

1.6.1.4 Bentuk Keterlibatan

Menurut (Waardenburg et al., 2020), tata kelola seringkali dihadapkan dengan tiga jenis tantangan yang sangat rumit. Pertama, ada kesulitan dalam menyelesaikan masalah yang substansial. Kedua, ada tantangan dalam proses kolaborasi. Ketiga, ada tantangan dalam akuntabilitas multi-relasional. Sebagai contoh, Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik yang fokus pada masalah seperti "tindakan kejahatan" bisa proses dimulai dengan mengenali masalah yang adatersebut dan menggali akar permasalahan.

Dalam konteks collaborative governance, penting untuk memahami bahwa unsur kunci dalam mencapai tujuan-tujuan dalam kerjasama antara berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan kelompok-kelompok lainnya, merupakan faktor yang sangat relevan (Merdeka, 2022). Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan sekitar 70% dari total wilayahnya terdiri dari laut. Potensi sumber

daya alam yang melimpah menegaskan status negara ini sebagai negara maritim. Namun, di tengah prestasi tersebut, masih banyak penduduk pesisir yang belum merasakan dampak positif dari pembangunan yang telah dilaksanakan di negara ini. Mayoritas masyarakat pesisir masih hidup dalam kemiskinan. Oleh karena itu, langkah-langkah perlu diambil untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat pesisir, dengan mempertimbangkan aspek budaya dan nilai-nilai yang mereka anut, melalui perangkat hukum atau kebijakan pemerintah (Merdeka, 2022).

Ketika melihat pada tingkat pendidikan yang cenderung rendah di kalangan nelayan, terdapat kesulitan dalam memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan modal, seperti jaminan, asuransi, dan ekuitas. Sebagian besar nelayan tidak memiliki kemampuan untuk mengakses sumber modal, dan seringkali mereka terpaksa mengambil pinjaman dari rentenir dengan tingkat bunga yang tinggi. Modal yang digunakan dalam usaha nelayan melibatkan aset yang dimiliki oleh mereka, peluang untuk mengembangkannya, manajemen modal usaha, namun hingga saat ini belum memberikan dampak positif yang signifikan pada peningkatan pendapatan ekonomi nelayan. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan dalam manajemen bisnis mikro dapat berpotensi meningkatkan pendapatan ekonomi para (Merdeka, 2022).

Aktor yang terlibat dalam pemerintahan kolaboratif (*collaborative government*) dapat beragam tergantung pada situasi dan jenis kolaborasi yang terjadi. Pemerintahan kolaboratif merupakan suatu pendekatan di

mana pemerintah bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan lainnya, untuk mengatasi masalah bersama atau mencapai tujuan bersama. Collaborative governance adalah sebuah bentuk pengaturan dalam pemerintahan yang melibatkan entitas non-pemerintah seperti masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan publik (Ansell & Gash, 2008). Pendekatan ini memungkinkan pelaksanaan program yang dijalankan oleh pemerintah untuk lebih sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat, sehingga menghasilkan manfaat yang sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat (Madya Putra Yaumil Ahad & Nugraha Barsei, 2023).

Daerah atau pemerintah lokal juga dapat terlibat dalam kolaborasi, terutama ketika masalah atau proyek tersebut memiliki lingkup yang lokal. Mereka dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal. Perusahaan dan bisnis pun dapat berperan dalam pemerintahan kolaboratif dengan melalui berbagai cara, seperti investasi dalam tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), berpartisipasi dalam kemitraan publik-swasta, atau mendukung program inovasi bersama yang bertujuan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan masyarakat. Masyarakat sipil, termasuk kelompok advokasi, kelompok warga, dan individu, juga dapat memainkan peran yang signifikan dengan memberikan masukan, melakukan advokasi, serta

berpartisipasi secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang kolaboratif.

Keterlibatan berbagai aktor ini sangat penting untuk memastikan adanya keragaman perspektif, keahlian, dan sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang kompleks dan mencapai tujuan bersama. Jenis kolaborasi seringkali memerlukan mekanisme koordinasi yang baik, dialog terbuka, serta komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat

1.6.1.5 Faktor Yang Mempengaruhi

(Gandisa Pangestuti Kiswoyo, Herbasuki Nurcahyanto, 2020) seperti yang dijelaskan dalam (Ansell & Gash, 2008) menggambarkan proses kolaborasi sebagai suatu rangkaian tindakan yang melibatkan dialog langsung serta partisipasi dari para pemangku kepentingan. Tujuan utama dari proses ini adalah mencapai keputusan yang didasarkan pada kesepakatan bersama, memungkinkan stakeholder untuk berkolaborasi sejalan dengan tujuan dan keuntungan bersama dalam program kegiatan yang sedang dilaksanakan. Selama siklus kolaborasi, komunikasi antara para stakeholder melalui pertemuan rutin dan negosiasi menjadi suatu keharusan.

Dalam konteks collaborative governance, seringkali ditemui berbagai kendala seperti hambatan dalam struktur hierarki organisasi, kurangnya dukungan dari pemerintah, kurangnya kepercayaan dari penduduk, keterbatasan informasi, keterbatasan tenaga kerja manusia, dan

kurangnya keterlibatan pihak-pihak lain seperti kemampuan pemerintah daerah. Semua ini menunjukkan bahwa collaborative governance memiliki dampak besar dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Jika dilaksanakan dengan benar dan maksimal, maka tujuan tersebut dapat dicapai secara efektif melalui kerjasama dalam hubungan antara pemerintah dan kelompok kepentingan yang sesuai, sebagaimana dijelaskan oleh Ningsi et al. dalam (Dorisman et al., 2021).

Perlu diingat bahwa setiap situasi pemerintahan kolaboratif memiliki karakteristik yang unik, dan faktor-faktor ini dapat berinteraksi dengan cara yang rumit. Oleh karena itu, perencanaan, adaptasi, dan manajemen yang cerdas sangat penting untuk berhasil menjalankan proses kolaboratif. Kepemimpinan yang kuat dan komitmen yang tulus dari pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong suksesnya proses kolaboratif. Pemerintah harus memberikan dukungan dan mengambil peran aktif dalam memimpin upaya kolaborasi, serta menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Selain itu, budaya organisasi yang mendorong kerjasama, pembelajaran bersama, dan komunikasi yang terbuka adalah faktor yang sangat krusial. Jika budaya organisasi pemerintah tidak mendukung kolaborasi, maka proses kolaboratif bisa menghadapi kesulitan dalam implementasinya. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan adalah elemen yang sangat penting dalam pemerintahan kolaboratif. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai

ke informasi dan peluang untuk berpartisipasi dalam diskusi dan perencanaan. Identifikasi dan fokus pada tujuan bersama yang jelas merupakan kunci kesuksesan dalam kolaborasi. Semua pihak yang terlibat harus memiliki visi yang serupa dan komitmen untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu, proses kolaboratif harus mencakup mekanisme untuk mengukur dan mengevaluasi hasil. Pembelajaran dari pengalaman sebelumnya juga dapat menjadi faktor peningkatan dalam proses kolaboratif di masa depan.

Tujuan dari collaborative governance adalah menyelesaikan isu atau permasalahan tertentu yang melibatkan para pemangku kepentingan. Pihak-pihak yang terlibat tidak terbatas pada institusi pemerintah ataupun non-pemerintah. Hal ini disebabkan dalam kerangka prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif, masyarakat sipil juga ikut terlibat dalam proses penyusunan dan pengambilan keputusan. Dalam tahap perencanaan tujuan, visi, misi, aturan, dan nilai yang digarap secara bersama-sama, setiap anggota memiliki peran yang sama, yang berarti mereka memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan secara independen, namun dengan batasan yang telah disepakati bersama.

Pemerintahan yang dikelola melalui collaborative governance melibatkan instansi pemerintah dan masyarakat umum dalam proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama yang memiliki karakter resmi. Pendekatan ini berorientasi pada kesepakatan dan pembagian

tanggung jawab dalam mengelola program publik serta aset publik (Ansell & Gash, 2008).

1.6.2 Pengembangan Dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Pengelolaan adalah serangkaian langkah yang melibatkan perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya atau aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. Ini melibatkan rangkaian tindakan dan keputusan yang diperlukan untuk mengatur sesuatu dengan cara yang efektif dan efisien. Pengelolaan dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk dalam bidang bisnis, pemerintahan, lingkungan, keuangan, dan sebagainya. (Arifin & Latif, 2020) mengemukakan bahwa pengelolaan adalah suatu proses yang dilakukan dalam rangka menjalankan pekerjaan tertentu dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan. Secara lebih umum, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengelolaan memiliki beberapa makna, termasuk proses pengaturan, pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan kerja sama orang lain, penyusunan kebijakan dan tujuan organisasi, serta pengawasan terhadap semua aspek yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.

(Kristiyanti, S.Kom, M.M, et al., 2023) menyoroti pentingnya keberadaan kedua institusi ini di setiap wilayah maritim di Indonesia. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut dengan tujuan yang jelas memerlukan integrasi dan sinergi di berbagai tingkatan, dari

daratan hingga perairan dalam. Pendekatan ini dapat membantu meminimalkan dampak negatif dari penggunaan sumber daya ini mencakup hal-hal seperti pencemaran, kerusakan lingkungan, erosi, ancaman tsunami, dan sejenisnya.

Penelitian dan Pengembangan (Research and Development) adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan dan menguji produk yang kemudian akan diaplikasikan dalam dunia pendidikan. Berbagai model penelitian yang ada dapat digunakan sebagai panduan dalam proses Penelitian dan Pengembangan (Amali et al., 2019). Jika pengembangan dijadikan dasar untuk memperbaiki kondisi masyarakat dan mengarahkan mereka ke arah yang lebih baik, maka pemerintah seharusnya memprioritaskan langkah-langkah yang berhubungan dengan pengembangan masyarakat. Hal ini mencakup kemampuan dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia dan menciptakan inovasi baru guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

(Makmur & Hadi, 2020) menyatakan bahwa untuk meningkatkan perkembangan Sumber Daya Manusia yang memiliki keunggulan dan dapat bersaing dalam pemulihan ekonomi, strategi yang dapat diterapkan adalah dengan mengeluarkan kebijakan dan alokasi sumber daya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Pendekatan ini berfokus pada penguatan keterampilan wirausaha digital dalam SDM. Upaya ini juga mencakup pengembangan keterampilan Sumber Daya Manusia yang relevan dengan pemanfaatan sumber daya alam dalam mendukung

ekonomi regional. Selain itu, penting untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia di tingkat lokal dengan berkolaborasi dalam pembuatan kebijakan perusahaan yang mendukung ekonomi digital dan mendorong inovasi guna menciptakan nilai tambah yang meningkatkan daya saing di dunia bisnis.

Kegiatan pengembangan masyarakat merujuk pada upaya untuk memajukan kelompok masyarakat tertentu di suatu wilayah, dan sering disebut sebagai pemberdayaan masyarakat. Kegiatan-kegiatan semacam ini semakin populer di Indonesia karena terbukti bahwa kebijakan ekonomi umum tidak selalu memberikan manfaat yang memadai bagi sebagian kelompok masyarakat (Intisari & Rosnina, 2019).

(Kristiyanti, S.Kom, M.M, et al., 2023) menggarisbawahi bahwa setiap wilayah di Indonesia yang memiliki kawasan maritim seharusnya memiliki institusi- institusi yang disebutkan. Manajemen dan eksploitasi sumber daya pesisir dan laut yang berkelanjutan memerlukan koordinasi dan sinergi antarunit yang dimulai dari daratan hingga ke laut dalam. Dengan pendekatan ini, efek buruk yang muncul akibat penggunaan sumber daya ini, seperti pencemaran, degradasi lingkungan, erosi, bahaya tsunami, dan lain sebagainya, bisa dikurangi.

(Mappa & Sirajuddin, 2023) menjelaskan bahwa upaya pengembangan dan pengelolaan sumber daya kelautan bertujuan untuk memanfaatkan serta menjaga sumber daya laut dan pesisir secara

berkelanjutan. Sumber daya kelautan mencakup berbagai aspek, termasuk ikan, flora dan fauna laut, ekosistem pesisir, serta mineral dan energi yang ada di laut. Pengelolaan yang efektif dari sumber daya kelautan sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan laut, mendukung mata pencaharian masyarakat pesisir, dan memastikan kelangsungan sumber daya tersebut bagi generasi mendatang. Peran pemerintah memiliki peranan yang sangat krusial dalam menjaga, melindungi, serta mengelola kekayaan dan potensi maritim di Indonesia, dengan tujuan utama untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam laut dengan efektif. Konsep ini juga sejalan dengan teori yang diajukan oleh Alfred Thayer Mahan mengenai faktor-faktor yang penting dalam membangun kekuatan maritim.

Pemanfaatan sumber daya hayati laut yang dilakukan dengan efektif dan tepat di wilayah ini memiliki potensi untuk memberikan dampak positif yang besar pada pendapatan daerah dan devisa negara. Potensi ini dapat direalisasikan melalui berbagai sektor, termasuk pariwisata, ekonomi, dan industri perikanan. Lebih dari sekedar keuntungan finansial, pendekatan berkelanjutan terhadap potensi laut ini juga memiliki dampak positif pada pelestarian lingkungan laut, yang pada gilirannya akan mendukung pemulihan ekosistem laut secara berkesinambungan. Pengelolaan wilayah pesisir menghadapi beragam tantangan, baik dari segi ekologi maupun sosial. Ancaman ekologis mencakup penurunan kualitas lingkungan akibat pencemaran, degradasi ekosistem, dan praktek penangkapan ikan berlebihan. Sementara itu,

tantangan sosial mencakup kendala dalam aksesibilitas, kurangnya partisipasi, serta penerimaan yang rendah dari masyarakat lokal. Sebagai tambahan, sektor perikanan masih belum mencapai potensinya karena beberapa faktor, termasuk kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam sektor ini yang masih rendah. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana serta kurangnya modal usaha juga menjadi hambatan dalam mengembangkan sektor perikanan.

1.6.3 Peningkatan Ekonomi Masyarakat

"Peningkatan" merujuk pada kemajuan, transformasi, atau perbaikan yang signifikan. Di sisi lain, "perekonomian" berasal dari kata dasar "Oikos" yang berarti "rumah tangga" dan "Nomos" yang berarti "aturan," sehingga secara harfiah menggambarkan aturan yang mengatur pemenuhan kebutuhan hidup dalam suatu rumah tangga (Nawawi, 2009). Dalam konteks yang lebih umum, "ekonomi" mengacu pada ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip produksi, distribusi, dan penggunaan barang serta kekayaan, termasuk aspek seperti keuangan, industri, dan perdagangan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005). Kata "ekonomi" sendiri berasal dari bahasa Yunani, di mana "oikos" berarti "keluarga" atau "rumah tangga," dan "nomos" berarti "aturan" atau "hukum," sehingga secara keseluruhan dapat diinterpretasikan sebagai "aturan rumah tangga" atau "manajemen rumah tangga."

Seseorang yang disebut sebagai "ahli ekonomi" atau "ekonom" adalah individu yang menggunakan konsep dan data ekonomi dalam pekerjaannya. Dengan demikian, ekonomi pada dasarnya adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan mengelola dan mendistribusikan sumber daya yang ada agar dapat digunakan oleh masyarakat (Said, 2016).

Pendapatan ekonomi masyarakat desa bersumber dari beberapa sektor, termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang perlu ditingkatkan agar ekonomi desa dapat berkembang dan meningkat (Danial et al., 2019).

"Peningkatan ekonomi bermula dari pemberdayaan kualitas sumber daya masyarakat, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, umumnya ditujukan untuk meningkatkan ekonomi dengan upaya peningkatan pendapatan masyarakat" (Habib, 2021).

Dalam upaya meningkatkan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat, terdapat tiga tahap yang harus dilalui (Anharudin et al., 2019). Tahap pertama adalah tahap "assessment," di mana dilakukan pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat beserta potensi yang dimilikinya. Hal ini melibatkan pengkajian dan penilaian terhadap kondisi wilayah atau desa yang menjadi fokus pengabdian masyarakat. Metode

yang dapat digunakan mencakup observasi langsung di lokasi, wawancara mendalam dengan calon mitra masyarakat, dan penelitian literatur untuk mengakses dokumen dan arsip yang relevan. Tahap kedua adalah "pelatihan," di mana masyarakat diberikan pelatihan dengan dukungan alat bantu yang sesuai untuk mempraktikkan apa yang telah dipelajari. Narasumber yang berkualitas, termasuk praktisi dan akademisi, dapat terlibat dalam memberikan pelatihan pada tahap ini. Tahap terakhir adalah "evaluasi dan perbaikan." Setelah program pengabdian masyarakat berjalan, evaluasi berkala diperlukan untuk mengamati kemajuan dan menilai sejauh mana tujuan program tercapai dan sejalan dengan hasil yang ditemukan di lapangan.

Menurut (Nopi et al., 2021) dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat, terdapat faktor-faktor yang berperan dalam mengoptimalkan potensi lokal. Faktor-faktor yang mempengaruhi mencakup tersedianya bahan baku atau sumber daya lokal yang cukup, motivasi yang didukung oleh pemerintahan di Desa Tanjung Gunung, situasi ekonomi yang menguntungkan, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Di sisi lain, terdapat faktor-faktor penghambat yang meliputi keterbatasan peralatan produksi, pengaruh cuaca, dan kendala dalam proses pemasaran.

1.7 Definisi Konseptual

1.7.1 Collaborative Governance

Collaborative governance (pengelolaan kolaboratif) adalah pendekatan dalam manajemen dan pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pihak atau pemangku kepentingan yang bekerja sama untuk mengatasi masalah atau mencapai tujuan bersama. Pendekatan ini menekankan kerjasama, komunikasi, dan keterlibatan aktif dari berbagai pihak yang terlibat dalam suatu isu atau proyek.

1.7.2 Pengembangan Dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Pengembangan dan pengelolaan sumber daya kelautan adalah proses yang penting untuk memastikan keberlanjutan ekosistem laut dan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan. konsep utama yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaan sumber daya kelautan meliputi beberapa aspek seperti i aspek, termasuk ikan, organisme laut, lahan basah, terumbu karang, minyak dan gas bumi, serta berbagai bentuk kehidupan laut lainnya. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya kelautan mencakup penggunaan yang berkelanjutan, perlindungan ekosistem laut, dan pencegahan degradasi lingkungan laut. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya kelautan adalah tugas yang kompleks dan memerlukan kolaborasi lintas sektor dan disiplin ilmu untuk mencapai tujuan keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan

1.7.3 Peningkatan Ekonomi

Peningkatan ekonomi merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara atau wilayah dalam periode waktu tertentu. Hal ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti peningkatan produksi barang dan jasa, peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Peningkatan ekonomi sering diukur dengan indikator ekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat inflasi, tingkat pengangguran, dan sejumlah indikator lainnya.

1.8 Definisi Operasional

No	Variabel	Indikator	Papameter
1.	Aktor Collaborative Governance	Pemerintah	Dinas Perikanan Kabupaten Natuna
		Swasta	Masyarakat Pengelola Penampungan Hasil Tangkap dan Pelaku Domestik
		Masyarakat	Masyarakat Nelayan Kabupaten Natuna
2.	Bentuk Kolaborasi	Identifying Obstacels And Oppornities	Dialog Antar Pemerintah dan Para Pemangku Kepentingan
		Debating Strategies For Influence	Diskusi mengenai langkah-langkah efektif pada permasalahan
		Planning Collaborative Acctions	Controlling Kebijakan Dan Kegiatan

			Partisipasi Kegiatan Pengembangan Dan pengelolaan
--	--	--	---

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Penelitian kualitatif pada dasarnya adalah metode penelitian yang mengumpulkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata atau lisan dari beberapa individu dan melalui observasi perilaku. Penelitian kualitatif menurut (Ahyar et al., 2020) merupakan penelitian yang dilakukan bertujuan untuk memahami pengalaman yang dialami oleh subjek penelitian, seperti karakteristik, niat, dan tindakan mereka secara komprehensif. Hal ini dilakukan melalui penggambaran dengan kata-kata dan bahasa dalam konteks alami tertentu serta dengan menggunakan berbagai metode yang sesuai dengan alamiahnya. Menurut moleong (Ahyar et al., 2020) Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian di mana informasi dikumpulkan dalam bentuk teks, ilustrasi, dan bukan dalam bentuk angka. Sebab data yang diungkapkan terdiri dari teks dan ilustrasi, peneliti hanya menjelaskan dan menggambarkan beragam situasi atau variabel yang ditemukan.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Natuna, tepatnya di desa/kelurahan Ranai. Dalam hal ini lokasi yang diambil oleh peneliti adalah Pemerintah Kabupaten Natuna. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa lokasi tersebut dianggap memiliki kapasitas untuk memberikan berbagai penjelasan, gambaran, dan paparan yang relevan dengan penelitian ini. Selain itu, alasan penulis memilih lokasi penelitian ini adalah karena wilayah Kota Desa tersebut memiliki potensi besar dalam hal kepiting bakau, yang didukung oleh adanya hutan bakau sebagai habitat utama kepiting bakau tersebut.

1.9.3 Jenis Data Penelitian

1. Data Primer

Menurut (Nopi et al., 2021) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber yang secara pribadi memberikan informasi kepada peneliti. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui proses wawancara. Narasumber adalah individu yang memiliki data yang diperlukan untuk memperkaya atau menjelaskan tanggapan responden secara langsung. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup pandangan para narasumber yang dianggap relevan dengan tema penelitian, seperti melakukan wawancara dengan pihak Dinas Pemerintah yang terkait serta dengan warga Kota

Ranai, serta merujuk pada dokumentasi yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

2. Data Sekunder

Menurut (Nopi et al., 2021) Sumber data sekunder adalah narasumber yang tidak secara langsung menyediakan data kepada peneliti. Data sekunder dapat ditemukan melalui penelusuran literatur dari berbagai sumber seperti buku-buku yang relevan, artikel, jurnal, arsip, media cetak, platform media sosial, peraturan hukum, serta penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema penelitian ini.

1.9.4 Unit Analisis Data

Dalam konteks penelitian ini, penulis memperoleh berbagai informasi dari narasumber yang ditemui secara langsung saat melakukan penelitian lapangan. Informasi ini merupakan elemen penting yang digunakan sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data guna menganalisis Strategi Pemerintah Kabupaten Natuna pengelolaan dan pengembangan potensi ekspor kepiting bakau sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat

. Unit analisa dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Dinas terkait
2. Masyarakat Kota Ranai

3. Swasta

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Ketika melaksanakan penelitian di lapangan, penulis menjalankan serangkaian tindakan sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut (Ahyar et al., 2020) wawancara adalah dialog yang diselenggarakan dengan tujuan tertentu. Kegiatan wawancara melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan 42 pertanyaan dan narasumber yang memberikan respons terhadap pertanyaan yang diajukan kepada mereka. Dalam kerangka penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung dengan individu-individu yang telah ditentukan sebagai narasumber mengenai strategi Pemerintah Kabupaten Natuna dalam meningkatkan perekonomian di wilayah tersebut. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dapat menjadi rujukan dalam penyusunan laporan.

Pengumpulan data adalah tahap krusial dalam penelitian, terutama ketika fokusnya adalah pengelolaan sumber daya perikanan di Kabupaten Natuna dengan pendekatan "Collaborative Government." Salah satu metode pengumpulan data yang efektif adalah wawancara, yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan langsung dari berbagai pihak yang terlibat dalam masalah tersebut. Dalam konteks ini, beberapa pihak yang dapat diwawancarai termasuk Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, lembaga konservasi, perusahaan

swasta, organisasi masyarakat lokal seperti POKMASWAS, dan komunitas kelompok nelayan.

Pengumpulan data melalui wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Kabupaten Natuna akan memberikan gambaran yang komprehensif dan multidimensi tentang tantangan, kebijakan, dan potensi kolaboratif dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan menjaga lingkungan laut yang berkelanjutan.

2. Dokumentasi

Menurut (Ahyar et al., 2020) Dokumen merujuk kepada materi tertulis maupun rekaman visual. Dalam penelitian ini, pengarsipan digunakan untuk menyimpan sejumlah informasi yang diperoleh secara langsung, seperti catatan wawancara, materi video, gambar, dan segala elemen penting yang berkaitan dengan isu yang menjadi fokus penelitian penulis..

3. Observasi

Teknik observasi memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari teknik lain, seperti wawancara dan kuesioner. Sementara wawancara dan kuesioner melibatkan interaksi dengan individu, teknik observasi tidak hanya terbatas pada manusia tetapi juga mencakup pengamatan terhadap fenomena alam dan objek-objek lainnya lain menurut (Dorisman et al., 2021). Data dalam teknik ini

dikumpulkan melalui pengamatan terhadap aktivitas dan peristiwa khusus yang relevan dengan penelitian penulis, dengan tujuan memperoleh informasi yang sesuai dengan realitas sebenarnya.

1.9.6 Teknik Analisis Data

Setelah menghimpun informasi dari hasil wawancara dan dokumen, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh penulis adalah pengolahan data. Pendekatan yang digunakan adalah analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan data yang diperoleh dari lapangan, menginterpretasikan informasi yang terkumpul, dan menyimpulkan temuan dari data tersebut. Menurut (Nopi et al., 2021) analisis adalah tahapan di mana data yang berasal dari wawancara dan dokumen diidentifikasi, dikelompokkan, diuraikan, disaring, informasi penting diekstraksi, dan kesimpulan dibuat dengan tujuan memudahkan pemahaman. Analisis data kualitatif menurut (Ahyar et al., 2020) adalah usaha yang dilakukan dengan cara berinteraksi dengan data, mengatur data, mengklasifikasikannya menjadi unit yang dapat dikelola, menyusunnya menjadi ringkasan, mengidentifikasi pola, menemukan informasi yang relevan, dan menentukan apa yang dapat disampaikan kepada orang lain. Langkah-langkah analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan data, penggabungan data yang terhimpun untuk kemudian diproses dan disajikan, serta penarikan kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan. Hasil analisis data disampaikan dalam bentuk deskripsi yang

menguraikan berbagai aspek yang relevan dengan studi tersebut. Menurut Miles dan Huberman (Nopi et al., 2021) terdapat tiga tahapan dalam teknik analisis data, yaitu reduksi data, display data, verifikasi data.

1. Reduksi data

Reduksi data yaitu melibatkan menggabungkan dan memilih elemen-elemen yang dianggap kunci, menyoroti aspek yang signifikan, menemukan pola serta tema yang muncul. Hasil dari proses reduksi data ini akan menghasilkan gambaran yang lebih terperinci dan akan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya..

2. Display data

Display data yaitu melibatkan cara menyajikan informasi dalam penelitian kualitatif, yang biasanya dalam bentuk teks naratif, untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih baik tentang kejadian yang sedang berlangsung. Hal ini juga membantu dalam perencanaan langkah-langkah berikutnya berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh.

3. Verifikasi data

data dalam analisis kualitatif adalah hasil dari sebuah penarikan kesimpulan yang dilakukan setelah melalui tahap-tahap awal penelitian yang telah diperkuat dengan bukti-bukti yang sah dan konsisten yang diperoleh dari pengumpulan data di lapangan. Kesimpulan ini merupakan kesimpulan penelitian yang dapat diandalkan.